

KOLEKTIVITAS SEBAGAI SISTEM NILAI PANCASILA DALAM PERKEMBANGAN LINGKUNGAN STRATEGIS DI INDONESIA: SUATU STUDI REFLEKTIF

¹Hayatul Khairul Rahmat, ¹M. Adnan Madjid, ²Syahti Pernanda

¹Universitas Pertahanan

²Universitas Negeri Padang

Email: hayatul.rahmat@idu.ac.id

Abstract: *Respondin to the development of the strategic environment provides opportunities and motivation for efforts to solidify the values of Pancasila as a philosophy of national life. For this reason, the study is needed to understand the collectivity as a Pancasila value system in the development of the strategic environment in Indonesia. This research used a library research method with a descriptive approach. The findings of this research are the collectivity in the life of the Indonesian people is a form of joint work of the Indonesian people in achieving the common goals of the Indonesian people so that Indonesia continues to stand on the basis of Unity in Diversity (Bhinneka Tunggal Ika) and not on the basis of the minorities of Indonesia's diversity. Pancasila is a philosophy of the personality of the Indonesian nation that was born from the collectivity of the nation's culture so that becoming a Pancasila is certainly able to face the development of a strategic environment both at the national and local levels. The use of Pancasila has become an instrument in order to maintain the integrity of the Indonesia and also to support national security.*

Keywords: *Pancasila, Strategic Environment, Collectivity.*

Abstrak: Menyikapi perkembangan lingkungan strategis memberikan peluang dan motivasi bagi upaya-upaya memantapkan nilai-nilai Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa. Untuk itu, maka sangatlah diperlukan sebuah kajian untuk memahami tentang kolektivitas sebagai sistem nilai Pancasila dalam perkembangan lingkungan strategis di Indonesia. Penulisan ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan pendekatan deskriptif. Temuan dari penelitian ini yaitu kolektivitas dalam kehidupan bangsa Indonesia adalah bentuk kerja bersama bangsa Indonesia dalam mencapai tujuan bersama bangsa Indonesia sehingga Indonesia terus berdiri atas dasar ke-Bhinneka Tunggal Ika dan bukan atas dasar minoritas-mayoritas dari keberagaman Indonesia tersebut. Pancasila merupakan sebuah falsafah kepribadian bangsa Indonesia yang terlahir dari kolektivitas budaya bangsa sehingga menjadi Pancasila tentunya mampu menghadapi perkembangan lingkungan strategis baik dalam tataran nasional maupun tataran lokal. Penggunaan Pancasila ini menjadi instrumen dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan juga untuk mendukung keamanan nasional.

Kata kunci: Pancasila, Lingkungan Strategis, Kolektivitas

PENDAHULUAN

Pancasila dirumuskan oleh para pendiri bangsa dengan tujuan sebagai *philosophische gronslag* yang mendasari kehidupan berbangsa dan bernegara bangsa Indonesia. Pancasila merupakan produk perenungan para pendiri bangsa (*the founding father*) dalam rangka mencari dan merumuskan sistem nilai sebagai acuan dalam praktik kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara. Konsekuensinya, Pancasila harus dipahami sebagai suatu ajaran yang diyakini sebagai

yang benar dan digali lewat daya panalaran. Dalam hal ini, Pancasila digali dan dirumuskan dari nilai-nilai kehidupan yang terpapar dalam sejarah kebudayaan Indonesia sehingga Pancasila menjadi identitas bangsa (Mulyono, 2008). Pancasila yang telah disusun berdasarkan nilai kehidupan bangsa dapat dipahami bahwa Pancasila merupakan kolektivitas dari kebudayaan bangsa Indonesia. Kolektivitas juga merupakan suatu *behavior* yang telah terpatri dalam bangsa Indonesia sehingga Indonesia dapat menggapai kemerdekaannya. Hal ini sejalan dengan pendapat Irfan (2017) yang menyebutkan bahwa kolektivitas itu adalah budaya gotong royong yang menjadi penciri dari *local wisdom* bangsa Indonesia yang menunjukkan kohesi sosial dalam solidaritas sosial dan interaksi sosial.

Indonesia dihadapkan dengan berbagai perubahan dan pergeseran kekuatan dalam lingkungan strategis, baik dalam tataran global, nasional, maupun lokal yang terus bergerak dan memberikan dampak dalam berbagai aspek kehidupan bangsa. Posisi Indonesia secara geografis, geostrategis, dan geopolitik secara langsung akan terpengaruh oleh arus perubahan dunia sehingga membangun manusia Indonesia sebagai warga masyarakat dunia atau masyarakat global tidak dapat dielakkan (Wahyudi, 2018; Rahmat *et al.*, 2020). Perubahan-perubahan tersebut merupakan kenyataan yang harus dihadapi dan diperhitungkan serta merupakan peluang bagi Indonesia untuk mempertahankan kepentingan nasional dan mencapai tujuan nasionalnya.

Indonesia sebagai negara dan bangsa yang mempunyai keberagaman etnis, perwujudan nasionalismenya diwarnai oleh permasalahan politik, ekonomi, dan etnisitas serta agama sehingga berbagai permasalahan tersebut menjadi sulit untuk diselesaikan secara tuntas tanpa melihat dan menghubungkan dengan perkembangan dinamika global dan regional. Menyikapi perkembangan lingkungan strategis memberikan peluang dan motivasi bagi upaya-upaya memantapkan nilai-nilai Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa. Untuk itu, maka sangatlah diperlukan sebuah kajian untuk memahami tentang kolektivitas sebagai sistem nilai Pancasila dalam perkembangan lingkungan strategis di Indonesia". Adapun penulisan ini bertujuan untuk menganalisis kolektivitas sebagai sistem nilai Pancasila dalam perkembangan lingkungan strategis di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Dalam penyusunan naskah ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu mengumpulkan semua bahan bacaan yang berkaitan dengan masalah yang dibahas, kemudian memahami secara teliti dan hati-hati sehingga menghasilkan temuan-temuan penelitian. Sebagai pendukung dalam penelitian ini, maka penulis melakukan kegiatan studi literatur yang mendalam yaitu dengan menggunakan penulisan deskriptif. Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu sistem pemikiran, atau suatu kelas peristiwa pada masa sekarang (Rahmat, 2019). Adapun tujuan dari penulisan deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat, serta hubungan antar fenomena yang diselidiki (Nazir, 2003). Data yang dikumpulkan dalam penulisan ini adalah data-data sekunder yaitu sumber data penulisan yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui media perantara. Data sekunder pada umumnya dapat berupa bukti, catatan, atau laporan historis yang telah disusun dalam arsip (data dokumenter), baik yang dipublikasikan maupun tidak dipublikasikan (Indriantoro & Soepomo, 2002). Metode penumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini melalui studi kepustakaan yaitu dengan membaca literatur-literatur yang berkaitan dan menunjang penelitian, berupa pustaka cetak maupun elektronik dan studi dokumentasi yang dilakukan dengan cara membaca laporan penulisan sebelumnya serta artikel-artikel yang diakses dari internet, buku, maupun jurnal yang sesuai dengan permasalahan. Pada metode pengumpulan data ini, penulis hanya mengambil data-data yang relevan

dari suatu sumber atau dokumen yang diperlukan. Dalam menganalisis data penulis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu data yang diperoleh kemudian disusun sehingga mempermudah pembahasan permasalahan yang ada. Karena titik fokus dari penelitian ini adalah penelitian yang berbasis pustaka, maka data yang dikumpulkan adalah data kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Memaknai Hakikat Kolektivitas

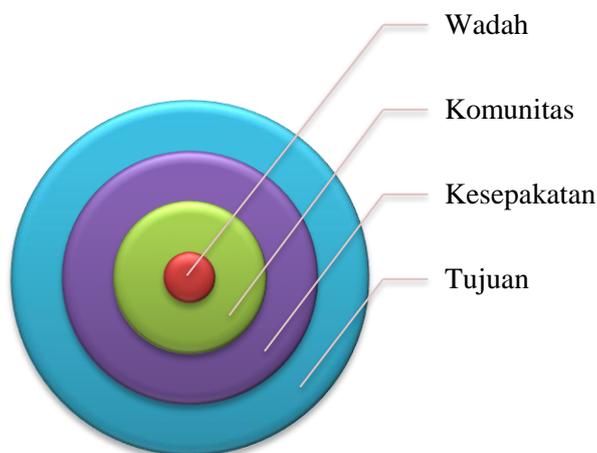
Kolektivitas dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2019) dapat diartikan sebagai perihal (keadaan) kolektif atau kolektifan. Sejalan dengan pengertian umum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tersebut, dipahami bahwa kolektivitas adalah bentuk gotong royong yang menghasilkan sebuah bentuk nilai tambah dalam kehidupan bermasyarakat (Mughits, 2017). Selain itu, kolektivitas juga diartikan sebagai adalah sebuah bentuk kerja bersama dalam mencapai tujuan bersama.

Dalam perjalanan sejarah Indonesia, Bung Karno menyatakan bahwa lima sila dalam Pancasila dapat diperas menjadi Ekasila yaitu gotong royong. Gotong royong merupakan sifat bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke (Puspa, 2013). Hal ini sudah menjadi warisan sejarah bangsa yang turun temurun yang tidak terbantahkan. Indonesia adalah wujud dari kolektivitas yang dinamakan dengan kebangsaan atau nasionalisme Indonesia. Setiap komponen bangsa dan setiap anggota masyarakat Indonesia harus terus menerus memahami bahwa Indonesia itu adalah kebersamaan dalam keanekaragaman atau dikenal dengan istilah Bhinneka Tunggal Ika (Sihombing, 2009). Dengan berbagai latar belakang etnis mewakili wajah dan jiwa bangsa Indonesia yang amat beragam, beragam dalam satu kolektivitas dalam keharmonisan kolektif dan kesepakatan kolektif sehingga terbentuklah *nation building*. *Nation building* ini dibentuk tidak hanya berdiri di atas dasar mayoritas-minoritas namun sebuah kolektivitas (Lumintang, 2009).

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa kolektivitas dalam kehidupan bangsa Indonesia adalah bentuk kerja bersama bangsa Indonesia dalam mencapai tujuan bersama bangsa Indonesia sehingga Indonesia terus berdiri atas dasar ke-Bhinneka Tunggal Ika dan bukan atas dasar minoritas-mayoritas dari keberagaman Indonesia tersebut. Adapun unsur-unsur kolektivitas tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Wadah (organisasi) merupakan suatu pola hubungan yang melalui orang per orang untuk mencapai tujuan bersama. Dalam hal ini, yang dikatakan wadah yaitu pemerintahan Republik Indonesia yang dikepalai oleh Presiden dan Wakil Presiden, dan dalam hal ini dibantu juga oleh menteri-menterinya serta juga ada lembaga yudikatif dan lembaga legislatif.
- b. Komunitas (masyarakat) merupakan sebuah kolompok sosial yang saling berinteraksi yang dibangun dengan menggunakan berbagai dimensi kehidupan. Dalam hal ini, masyarakat tersebut adalah seluruh warga negara Indonesia.
- c. Kesepakatan (pedoman) yang dimaksudkan adalah Pancasila yang menjadi sumber dari segala sumber hukum maupun nilai di Indonesia.
- d. Tujuan (sasaran) merupakan cita-cita yang ingin dicapai oleh bangsa Indonesia. Dalam hal ini dikenal dengan *national goals*. Adapun tujuan nasional Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian, dan keadilan sosial. Adapun tujuan nasional ini termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Suhardin, 2012).

Berdasarkan penjelasan unsur-unsur di atas, maka dapat digambarkan kolektivitas dalam Gambar 1 sebagai berikut:



Gambar 1. Unsur-unsur kolektivitas.

Sumber: Suhardin (2012).

Pancasila sebagai Sebuah Sistem: Sebuah Uraian Singkat

Pancasila secara yuridiksi adalah dasar filsafat negara atau lebih dikenal juga dengan *philosophische gronslag* yang mengandung konsekuensi bahwa dalam setiap aspek penyelenggaraan negara harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Hal tersebut meliputi segala peraturan perundang-undangan dalam negara, moral negara, kekuasaan negara, rakyat, bangsa, wawasan nusantara, pemerintahan, dan aspek-aspek kenegaraan lainnya (Sulisworo *et al*, 2012). Suatu sistem dapat dipahami dari beberapa bagian unsur-unsur yang saling berhubungan sehingga merupakan suatu kesatuan dalam mencapai tujuan. Selain itu, juga terdapat beberapa pengertian sistem. Menurut Fowler (dalam Mudhofir, 1996) menyebutkan sistem adalah *complex whole, set of connectef or port, organized body of material or immaterial things*. Pengertian ini dapat dipahami sistem itu suatu komponen yang kompleks yang saling berkoneksi antar bagiannya dan diatur oleh suatu pengaturan yang sifatnya materi atau non material. Selain itu, Hornby (1973) menyebutkan sistem yaitu *group of things or ports working together in a regulated relation and ordered sets of ideas, theories, priciple and a system of philosophy*. Dapat diartikan bahwa sistem merupakan kumpulan dari sesuatu atau bagian-bagian yang saling bekerjasama dalam regulasi yang tetap dan diatur oleh ide, nilai, dan prinsip secara filsafati. Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa sistem dapat disimpulkan yaitu di dalam suatu sistem termuat adanya sejumlah unsur atau bagian, unsur yang termuat saling berkaitan antar satu sama lain sehingga merupakan kesatuan yang utuh, hubungan diantara unsur tersebut bersifat tetap, dan dalam suatu sistem termuat adanya maksud dan tujuan yang ingin dicapai.

Pancasila sebagai sistem berarti Pancasila terdiri dari beberapa bagian yaitu beberapa sila/ nilai dasar yang saling berelasi atau berhubungan baik dalam hal susunan maupun perwujudannya sehingga kelima sila merupakan satu kesatuan dalam rangka mencapai tujuan negara (*nation goals*). Dipahami bahwa saling berhubungan tersebut bahwa dalam hal susunan sila-sila Pancasila yang ada lima tersebut tidak dapat ditukar balikkan dan saling menyempurnakan apabila salah satu sila tidak terwujud akan mempengaruhi perwujudan sila-sila lainnya. Pancasila sebagai sistem dapat dijelaskan dalam empat istilah sebagai berikut:

- a. Majemuk tunggal yaitu Pancasila terdiri dari banyak sila dan merupakan suatu kesatuan.
- b. Satu kesatuan organis diartikan bahwa Pancasila setiap masing-masing sila memiliki kedudukan yang mutlak harus ada, jika salah satu sila hilang akan berakibat pada adanya sila lainnya.
- c. Saling mengkualifikasi dipahami bahwa dalam perwujudan sila-sila Pancasila saling menyempurnakan dan saling mengisi.
- d. Hierarkhis piramidal dijelaskan bahwa urutan dari pengertian dan isi pengertian dari kelima sila Pancasila tersebut berbanding terbalik (Sulisworo *et al*, 2012).

Aksiologi Pancasila: Arti Penting Sebuah Sistem Nilai Pancasila

Aksiologi Pancasila membahas tentang nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila tersebut kemudian menjadi pertimbangan masyarakat, bangsa, dan para pemimpin untuk menerapkan hasil pemikiran-pemikiran dan kebijakan. Arti nilai sangat banyak sekali sesuai dengan latar belakang dan kepentingan masing-masing. Nilai bersifat abstrak, universal, dan tidak dapat berdiri sendiri (membutuhkan pembawa/ *trager*). Nilai bersifat abstrak dapat diartikan bahwa nilai tidak dapat dijangkau oleh panca indra, tetapi dapat dijangkau oleh pikiran. Nilai bersifat universal berarti nilai berlaku umum dapat diterapkan pada semua hal yang sejenis. Tidak dapat berdiri sendiri (membutuh pembawa/ *trager*) maksudnya nilai membutuhkan media (Sulisworo *et al*, 2012). Pancasila yang berisi seperangkat nilai-nilai dasar ideal merupakan komitmen kebangsaan, identitas bangsa, dan menjadi dasar pembangunan karakter ke-Indonesia-an. Mendasarkan pada perspektif teori fungsionalisme struktural, suatu negara yang majemuk seperti halnya Indonesia membutuhkan nilai bersama yang dapat dijadikan nilai pengikat integrasi (*integrative value*), titik temu (*common denominator*), jati diri bangsa (*national identity*), dan sekaligus nilai yang dianggap baik untuk diwujudkan (*ideal value*) (Narmoatmojo, 2010).

Pancasila sebagai nilai mengandung serangkaian nilai yaitu nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan (Octavian, 2018). Kelima nilai ini merupakan satu kesatuan yang utuh, yang tidak dapat dipisahkan mengacu kepada tujuan yang satu. Nilai-nilai tersebut merupakan manifestasi dari nilai-nilai kehidupan bermasyarakat (Masrukhi & Wahono, 2019). Menurut Moerdiono (dalam Mulyono, 2016) menyebutkan bahwa dalam ideologi bangsa yaitu Pancasila terdapat tiga tataran nilai yaitu sebagai berikut:

- a. Nilai dasar merupakan suatu nilai yang bersifat amat abstrak dan tetap yang terlepas dari pengaruh perubahan waktu. Nilai dasar merupakan prinsip yang bersifat sangat umum dengan kandungan kebenaran bagaikan aksioma.
- b. Nilai instrumental berarti suatu nilai yang bersifat kontekstual. Nilai instrumental merupakan penjabaran dari nilai-nilai Pancasila yang merupakan arah kinerjanya untuk kurun waktu tertentu dan untuk kondisi tertentu.
- c. Nilai praksis yaitu nilai yang terdapat dalam kenyataan sehari-hari berupa cara bagaimana rakyat melaksanakan atau mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila. Nilai praksis terdapat pada wujud penerapan nilai-nilai Pancasila baik secara tertulis maupun tidak tertulis.

Menurut Rukiyati (2008), dapat setiap sila dari Pancasila mengandung arti dan makna yang disajikan dalam Tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1. Arti dan makna sila dalam Pancasila

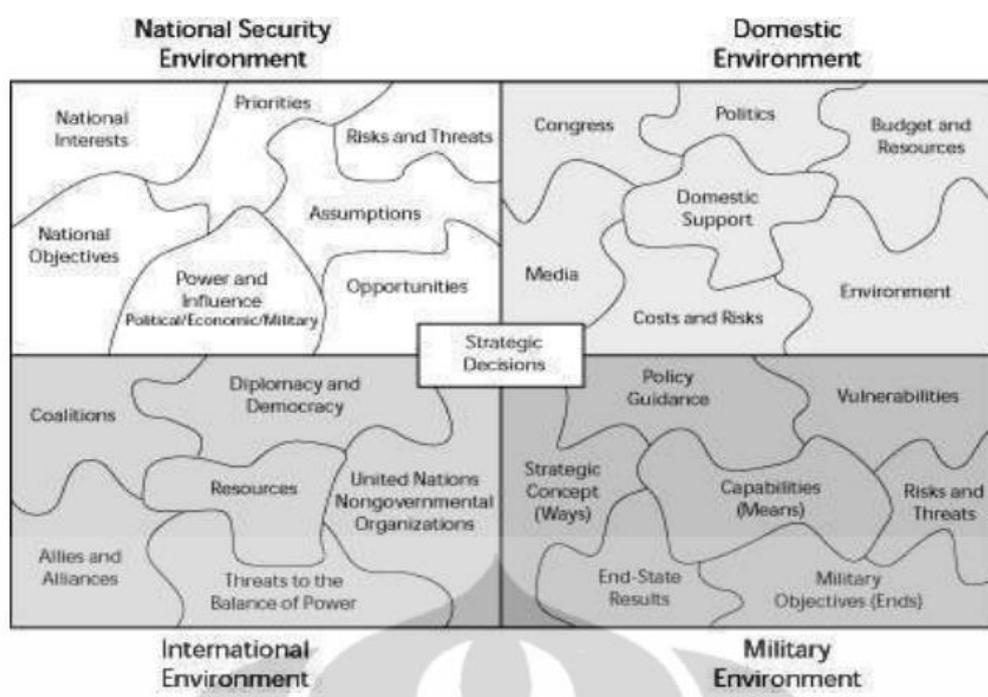
No.	Sila	Arti dan Makna
1	Ketuhanan Yang Maha Esa	a. Pengakuan adanya kausa prima (sebab pertama) yaitu Tuhan Yang Maha Esa

No.	Sila	Arti dan Makna
		<p>b. Menjamin penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan beribadah menurut agamanya</p> <hr/> <p>c. Tidak memaksa warga negara untuk beragama dan diwajibkan memeluk agama sesuai dengan hukum yang berlaku</p> <hr/> <p>d. Atheisme dilarang hidup dan berkembang di Indonesia</p> <hr/> <p>e. Menjamin berkembang dan tumbuh suburnya kehidupan beragama.</p> <hr/> <p>f. Negara memberi fasilitas bagi tumbuh berkembangnya agama dan iman warga negara dan menjadi mediator ketika terjadi konflik antar agama</p>
2	Kemanusiaan yang Adil dan Beradab	<p>a. Menempatkan manusia sesuai dengan hakikatnya sebagai makhluk Tuhan yang dipahami bahwa kemanusiaan itu mempunyai sifat yang universal</p> <hr/> <p>b. Menjunjung tinggi kemerdekaan sebagai hak segala bangsa</p> <hr/> <p>c. Mewujudkan keadilan dan peradaban yang tidak lemah</p>
3	Persatuan Indonesia	<p>a. Nasionalisme</p> <hr/> <p>b. Cinta bangsa dan tanah air</p> <hr/> <p>c. Menggalang persatuan dan kesatuan bangsa</p> <hr/> <p>d. Menghilangkan penonjolan kekuatan atau kekuasaan, keturunan, dan perbedaan warna kulit</p> <hr/> <p>e. Menumbuhkan rasa nasib sepenanggungan</p>
4	Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan	<p>a. Hakikat dari sila ini adalah demokrasi</p> <hr/> <p>b. Permusyawaratan artinya mengusahakan putusan bersama secara bulat dan baru sesudah itu diadakan tindakan bersama</p> <hr/> <p>c. Dalam melakukan keputusan diperlukan kejujuran bersama</p>
5	Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia	<p>a. Kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat dalam arti dinamis dan meningkat</p> <hr/> <p>b. Seluruh kekayaan alam dipergunakan bagi kebahagiaan bersama menurut potensi masing-masing</p> <hr/> <p>c. Melindungi yang lemah agar kelompok warga masyarakat dapat bekerja sesuai dengan bidangnya</p>

Sumber: Rukiyati (2008)

Perkembangan Lingkungan Strategis dalam Skala Nasional dan Lokal: Sebuah Konsepsional

Perkembangan lingkungan strategis memberikan peluang dan motivasi bagi upaya-upaya memantapkan nilai-nilai Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa. Sebelum itu, perlu dipahami pengertian dari lingkungan strategis. Adapun lingkungan strategis menurut Guilliot (2003) adalah *one construct includes four distinct, interrelated parts: the national security, domestic, military, and international environment*. Dapat dipahami bahwa lingkungan strategis adalah keadaan yang berkaitan dengan keamanan bernegara yang menekankan pada pentingnya analisa bidang politik dan militer. Kerangka pemikiran ini memberikan keleluasaan dalam melihat atmosfer politik dan militer sebagai bagian Analisa aktor dan faktor yang mempengaruhi hubungan bernegara, khususnya bidang politik dan militer. Adapun pemikiran Guilliot (2003) dapat dijelaskan berdasarkan Gambar 2 berikut:



Gambar 2. Lingkungan strategis.

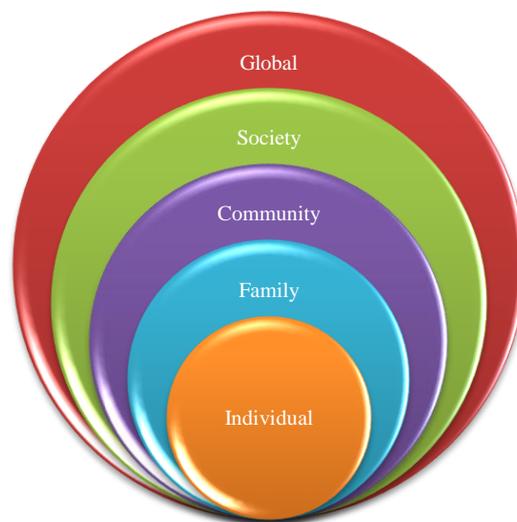
Sumber: Guilliot (2013).

Dalam pendapat Frank (2003) menyebutkan lingkungan strategis adalah *security environment is an external environment affecting national security policy. It can be seen as an area where national interest are implemented and where these face interest of others actors within the systems of international relations and where those processes take place substantially influencing the level of national security*. Dalam dipahami bahwa lingkungan strategis akan menggambarkan adanya potensi bentuk dan eskalasi konflik, penilaian potensi ancaman, dan penilaian kapabilitas yang harus dikembangkan. Adapun perkembangan lingkungan strategis perlu diantisipasi dengan berbagai langkah nyata demi mengembangkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang berkualitas yaitu sebagai berikut:

- a. Globalisasi. Di dalam lingkungan globalisasi terjadi interkoneksi pengaruh dari faktor politik, teknologi, budaya, dan ekonomi. Hal itu difasilitasi oleh kemajuan komunikasi dan teknologi sedemikian rupa sehingga menghasilkan *uncertainty, complexity, dan competition* (Silalahi,

- 2010). Fenomena globalisasi membawa gerbong lain seperti demokratisasi, hak asasi manusia, isu lingkungan hidup, dan *good governance* dengan komponen transparansi, partisipasi, dan *accountability* (Effendi, 2001).
- b. Otonomi daerah. Secara konsepsional otonomi daerah adalah landasan bagi pemberdayaan ekonomi guna meningkatkan daya saing dan kesejahteraan di daerah (Nugroho, 2011).
 - c. Peran media massa. Media massa telah menjadi kekuatan yang signifikan mempengaruhi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Media massa perlu dikelola dan dioptimalkan untuk memperkuat siklus manajemen nasional, dari tata kehidupan masyarakat, tata politik nasional, tata administrasi negara, dan tata laksana pemerintahan di dalam mengembangkan wawasan nasional (Nugroho, 2011).
 - d. Gerakan primordial. Fenomena demokratisasi dan kesadaran hak asasi manusia terkadang membangkitkan gerakan primordial tertentu berlatar agama, etnik, atau ikatan tertentu.
 - e. Disintegrasi sosial merupakan perpecahan atau hilang persatuan suatu bangsa yang mengakibatkan perpecahan. Penyebabnya adalah karena tidak puas dan rasa ketidakadilan oleh masyarakat terhadap pemerintah yang mengakibatkan pemberontakan atau separatisme (Herlina, 2018).
 - f. Bencana merupakan peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam, faktor non alam, maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis (Asyari, 2018).

Berdasarkan Brofenrenner (dalam Silalahi, 2010) disebutkan lingkungan strategis memiliki empat level yaitu individu, keluarga, masyarakat, nasional, dan dunia yang dijelaskan dalam gambar sebagai berikut:



Gambar 3. Level lingkungan strategis.

Sumber: Silalahi (2010).

Suatu Refleksi dari Kolektivitas sebagai Sistem Nilai Pancasila dalam Perkembangan Lingkungan Strategis

Pancasila sebagai dasar negara, ideologi, dan pandangan bangsa harus dipedomani oleh bangsa Indonesia dalam proses penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam rangka mewujudkan cita-cita proklamasi kemerdekaan (Octavian, 2019). Seiring dengan perjalanan

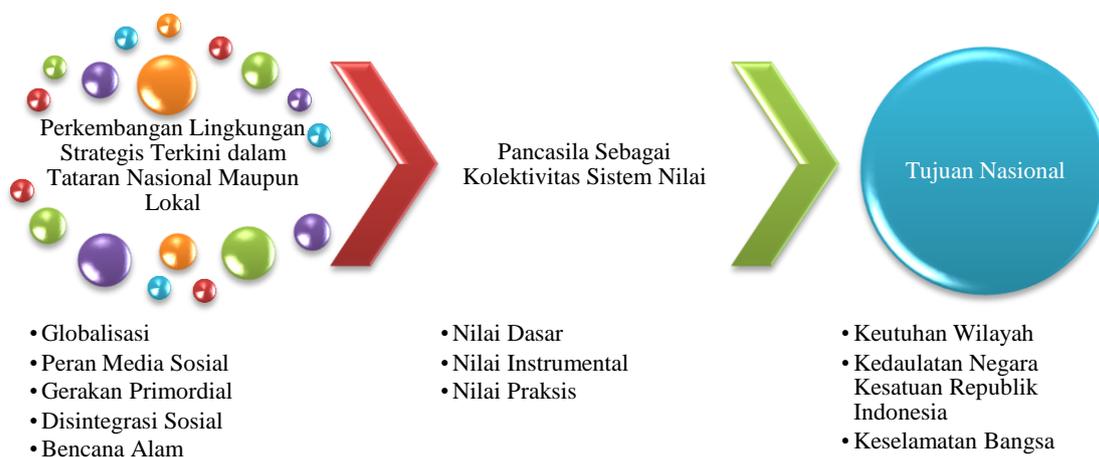
waktu, tentunya Pancasila merupakan sebuah kolektivitas akan nilai-nilai yang didalamnya tersusun nilai-nilai ke-Indonesiaan. Untuk itu, nilai tersebut mampu mengikuti perkembangan lingkungan strategis yang senantiasa terus berkembang setiap tahunnya. Diketahui bahwa Pancasila menjadikan pandangan hidup bangsa yang nilai-nilainya bersifat nasional yang mendasari kebudayaan bangsa, maka nilai-nilai tersebut merupakan perwujudan dari aspirasi (cita-cita hidup bangsa) (Muzayin, 1992). Dalam kolektivitas sebagai sistem nilai Pancasila, maka nilai-nilai Pancasila tersebut dapat memiliki makna sebagai langkah dalam perkembangan lingkungan strategis:

- a. Sila Pertama Ketuhanan Yang Maha Esa (nilai ketuhanan) dimaksudkan bahwa sila Ketuhanan yang maha esa merupakan “roh” sekaligus dasar dari keempat sila lainnya. Ketuhanan Yang Maha Esa bermakna bahwa Bangsa Indonesia adalah Negara yang monotheisme percaya terhadap Tuhan yang satu bukan sebaliknya (Kaelan dan Zubaidi, 2007). Dengan kata lain, negara Indonesia berlandaskan agama. Pancasila dengan sila pertamanya, adalah sebuah falsafah yang sesuai dan bersahabat dengan agama. Oleh karenanya, sudah seharusnya sebagai Insan yang beriman dan bertakwa kepada Allah dengan mendirikan pemerintahnya guna meningkatkan kesalehan kita. Kita sebagai bangsa Indonesia sudah sepatutnya menyadari realitas kemajemukan Indonesia sebagai sebuah berkah dari Allah, yang perlu dikembangkan dan dilestarikan. Keberagaman semestinya tidak bersifat hierarkis, melainkan egaliter, dan oleh karena itu berimplikasi pada nilai etis toleransi. Sebagai umat beragama yang beriman dan bertakwa kepada Allah, sudah semestinya kita menanamkan nilai-nilai kebenaran, kebaikan, kejujuran, dan kemuliaan dalam diri, sehingga meningkatkan moral bangsa.
- b. Nilai Kemanusiaan yang adil dan beradab (nilai kemanusiaan). Nilai yang terkandung dari sila kedua Pancasila adalah nilai kemanusiaan. Kemanusiaan yang dimaksud adalah manusia yang adil dan beradab, menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan, yang diwujudkan dalam semangat saling menghargai, toleran, yang dalam perilaku sehari-hari didasarkan pada nilai-nilai moral yang tinggi, serta untuk kepentingan bersama (Asmaroini, 2016). Dengan mengimplementasikan sila kedua ini diharapkan bahwa permasalahan yang dialami bangsa saat ini seperti tidak adanya toleransi, konflik antar golongan, pengangguran, kemiskinan, mafia kasus, korupsi, diskriminasi dan kesenjangan sosial, tindakan kekerasan, baik secara vertikal maupun horizontal, dapat teratasi (Ma'rufah *et al.*, 2020).
- c. Sila Ketiga: Persatuan Indonesia. Indonesia adalah Negara yang kaya akan keberagaman suku, agama, bahasa, budaya, dan ras. Namun dengan terbentuknya NKRI, dimulailah komitmen bersama untuk terus membentengi keberagaman itu untuk mewujudkan Indonesia yang maju, adil, dan sejahtera. Itulah makna yang terkandung dari sila persatuan Indonesia. Sesuai dengan konstitusi tujuan negara ialah berkewajiban memberikan perlindungan kepada segenap tumpah darah Indonesia dan seluruh isinya dengan semangat persatuan tersebut. Perlakuan yang sama pada seluruh warga dimanapun berada haruslah dilakukan oleh pemerintah tanpa memandang latar belakang suku, ras, budaya, maupun agamanya. Warga negara dalam semangat kebersamaan seharusnya melakukan tindakan yang tetap menunjukkan sikap dan perbuatan yang NKRI untuk kebahagiaan dan kemajuan bersama. Semangat persatuan inilah yang harus terus dijaga agar NKRI tetap eksis, dan dapat menjadi kuat karena terbangun dari jalinan keberagaman yang harmonis.
- d. Sila Keempat: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Konstitusi mengamanatkan untuk mewujudkan negara yang demokratis, yang mana kedaulatan diserahkan sepenuhnya kepada rakyat. Nilai yang terkandung Sila keempat Pancasila adalah pedoman berdemokrasi Indonesia. Namun bagaimana cara mengimplementasikan demokrasi Indonesia masih dalam tahap pencarian identitas. Sejak merdeka, Indonesia telah

melalui beberapa tahapan demokrasi, yaitu demokrasi masa revolusi, demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi era orde baru dan demokrasi era reformasi. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji ulang gagasan demokrasi sesungguhnya sesuai dengan amanat sila ke empat Pancasila.

- e. Sila Kelima: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila keadilan sosial mengandung makna bahwa setiap warganegara diperlakukan sama tanpa adanya perbedaan suku, ras, agama, bahasa, kaya dan miskin, maupun jabatan. Semua warganegara harus diperlakukan adil oleh negara. Perwujudan dari sila keadilan sosial ini dapat berupa penegakan hukum dengan asas keadilan bukan keuangan dan jabatan, tidak ada tekanan baik fisik maupun mental terhadap rakyat, mendapatkan kehidupan yang sejahtera atau terbebas dari kemiskinan, dan kebodohan, serta dari tekanan pihak asing. Pemerintah berpihak kepada rakyat yang harus dibela, bukan kepada golongan tertentu yang mempunyai kepentingan. Itulah prinsip keadilan yang terkandung dalam sila ke-lima. Namun sesungguhnya prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menjadi anak tangga pertama yang harus dipijak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Keadilan dalam konteks aturan, kebijakan, tindakan, dan perlakuan yang adil terhadap rakyatnya dapat membuat masyarakat leluasa bermusyawarah dan bermufakat mencari solusi persoalan. Tegaknya keadilan membuat bangsa akan lebih mudah dalam menyatukan kekuatan untuk dapat mewujudkan kemakmurannya yang bermartabat. Keadilan juga akan mempertebal rasa kemanusiaan dan saling mencintai sesama ciptaan Tuhan. Akhirnya keadilan dapat membuat setiap orang tenang beribadah tanpa harus merasa terancam oleh kelompok lain yang berbeda keyakinan.

Berdasarkan nilai dan makna dari Pancasila sebagai sumber nilai di atas, maka untuk menghadapi perkembangan lingkungan strategis baik dalam tataran nasional maupun lokal dapat dipahami terlebih dahulu melalui kerangka berikut:



Gambar 4. Konsep kolektivitas sebagai sistem nilai pancasila dan lingkungan strategis.
Sumber: Diolah oleh Penulis (2020).

Berdasarkan Gambar 4, dipahami bahwa perkembangan lingkungan strategis terkini dalam tataran nasional maupun lokal terdiri atas beberapa hal seperti globalisasi, peran media sosial, gerakan primordial, disintegrasi sosial, dan bencana. Selain itu, juga terdapat perkembangan

lingkungan strategis lainnya seperti ASEAN *Economic Community* yaitu Masyarakat Ekonomi ASEAN yang juga menjadi isu strategis yang harus diperhatikan oleh Indonesia dalam tataran global. Tetapi dalam tataran nasional dan lokal, kelima isu strategis tersebut sangat penting diperhatikan dikarenakan dapat menjadi ancaman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk itu, Pancasila merupakan sebuah falsafah kepribadian bangsa Indonesia yang terlahir dari kolektivitas budaya bangsa sehingga menjadi Pancasila tentunya mampu menghadapi perkembangan lingkungan strategis baik dalam tataran nasional maupun tataran lokal. Penggunaan Pancasila ini menjadi instrumen dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan juga untuk mendukung keamanan nasional.

SIMPULAN DAN SARAN

Kolektivitas dalam kehidupan bangsa Indonesia adalah bentuk kerja bersama bangsa Indonesia dalam mencapai tujuan bersama bangsa Indonesia sehingga Indonesia terus berdiri atas dasar ke-Bhinneka Tunggal Ika dan bukan atas dasar minoritas-mayoritas dari keberagaman Indonesia tersebut. Pancasila sebagai sistem berarti Pancasila terdiri dari beberapa bagian yaitu beberapa sila/ nilai dasar yang saling berelasi atau berhubungan baik dalam hal susunan maupun perwujudannya sehingga kelima sila merupakan satu kesatuan dalam rangka mencapai tujuan negara (*nation goals*). Pancasila merupakan sebuah falsafah kepribadian bangsa Indonesia yang terlahir dari kolektivitas budaya bangsa sehingga menjadi Pancasila tentunya mampu menghadapi perkembangan lingkungan strategis baik dalam tataran nasional maupun tataran lokal. Penggunaan Pancasila ini menjadi instrumen dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan juga untuk mendukung keamanan nasional.

REFERENSI

- Adhayanto, O. (2015). Implementasi Nilai-Nilai Pancasila sebagai Dasar Negara dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. *Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2), 1-12.
- Asmaroini, A. P. (2016). Implementasi Nilai-Nilai Pancasila bagi Siswa di Era Globalisasi. *Citizenship: Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, 4(2), 440-450.
- Asyari, Q. (2018). Analisis Dampak Sosial Ekonomi Pasca Bencana di Kabupaten Pemekasan (Studi Kasus Banjir, Longsor, dan Kekeringan di Pemekasan 2007). *J-MACC: Journal of Management and Accounting*, 1(2), 153-168.
- Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2019). Kolektivitas. Retrieved from <http://www.kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Kolektivitas>, diakses tanggal 17 Maret 2020.
- Effendi, B. (2001). *Teologi Baru Politik Islam: Pertautan Agama, Negara, dan Demokrasi*. Yogyakarta: Galang Press.
- Frank, L. (2003). The Czech Republik Security Environment. Retrieved from http://www.army.cz/mo/om/obrana_a_strategic/1-2003eng/frank.pdf, diakses tanggal 17 Maret 2020.
- Guillot, M. W. (2003). Strategic Leadership: Defining the Challenge. *Air and Space Journal*, 17(4), 4-8.
- Herlina, L. (2018). Disintegrasi Sosial dalam Konten Media Sosial Facebook. *Temali: Jurnal Pembangunan Sosial*, 1(2), 232-258.
- Hornby, A. S. (1973). *The Advanced Learner's Dictionary of Current English*. London: Oxford University Press.

- Irfan, M. (2017). Metamorfosis Gotong Royong dalam Pandangan Konstruksi Sosial. *Prosiding KS: Riset & PKM*, 4(1), p. 1-10.
- Kaelan & Zubaidi, A. (2007). *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi*. Yogyakarta: Paradigma.
- Lumintang, S. I. (2009). *Re-Indonesiasi Bangsa*. Batu: Multimedia YPPH.
- Ma'rufah, N., Rahmat, H. K., & Widana, I. D. K. K. (2020). Degradasi Moral sebagai Dampak Kejahatan Siber pada Generasi Millennial di Indonesia. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 7(1), 191-201.
- Masrukhi, & Wahono, M. (2019). Model Ikhtiar Pembudayaan Nilai-Nilai Pancasila di Kalangan Masyarakat Desa. *Bhineka Tunggal Ika: Kajian Teori dan Praktik PKn*, 6(2), 182-188.
- Mudhofir, A. (1996). Pancasila sebagai Sistem Kefilsafatan. *Jurnal Filsafat*, 1(1), 9-13.
- Mughits. (2017). Pengertian Kolektivitas. Retrieved from <http://lektur.id/kamus/kata>, diakses tanggal 17 Maret 2020.
- Mulyono. (2008). *Hakikat dan Dinamika Pancasila*. Semarang: Semarang University Press.
- Mulyono. (2016). Pancasila sebagai Orthodoksi dan Orthopraxis dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara. *Humanika*, 23(2), 40-48.
- Muzayin. (1992). *Ideologi Pancasila*. Jakarta: Golden Terayon Press.
- Narmoatmojo, W. (2010). *Implementasi Pancasila Melalui Pendidikan Kewarganegaraan (Civics Education)*. Yogyakarta: Ombak.
- Nazir, M. (2003). *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Nugroho, I. (2011). Peran Kepemimpinan Nasional dalam Implementasi Nilai-Nilai Pancasila sebagai Falsafah Hidup Bangsa dan Pembangunan Nasional. Retrieved from <http://www.researchgate.net/publication/293806712>, diakses tanggal 18 Maret 2020.
- Octavian, W. A. (2018). Urgensi Memahami dan Mengimplementasikan Nilai-Nilai Pancasila dalam Kehidupan Sehari-hari Sebagai Sebuah Bangsa. *Jurnal Bhinneka Tunggal Ika*, 5(2), 123-128.
- Octavian, W. A. (2019). Upaya Peningkatan Pemahaman Nilai Pancasila Terhadap Siswa Melalui Kegiatan Penyuluhan. *Bhineka Tunggal Ika: Kajian Teori dan Praktik PKn*, 6(2), 199-207.
- Puspa, R. (2013). Kolektivitas itu Gotong Royong. Retrieved from http://www.kompasiana.com/amp/rudolfpuspa/kolektivitas-itu-gotong-royong_5528e9816ea83460318b45d1, diakses tanggal 18 Maret 2020.
- Rahmat, H. K. (2019). Pengembangan AIDSPEDIA-BKI sebagai Media Bimbingan dan Konseling Berbasis Android Untuk Layanan Informasi (Studi di MAN 3 Sleman). (*Thesis*). Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Rahmat, H. K., Ma'rufah, N., Banjarnahor, J., & Widana, I. D. K. K. (2020). Pemberdayaan Masyarakat oleh Bintara Pembina Desa (Babinsa) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 7(1), 91-107.
- Rukiyati. (2008). *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: UNY Press.
- Sihombing, L. (2009). Hakikat Kolektivitas dalam Kehidupan Berbangsa Indonesia. *Jurnal Amanat Agung*, 5 (2), p. 215-226.
- Silalahi, T.B. (2010). *Kepemimpinan Visioner dalam Rangka Reformasi Birokrasi*. Jakarta: Lembaga Ketahanan Nasional.
- Suhardin, Y. (2012). Peranan Negara dan Hukum dalam Memberantas Kemiskinan dengan Mewujudkan Kesejahteraan Umum. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 42(2), 302-317.

- Sulisworo, D., Wahyuningsih, T., & Arif, D. B. (2012). *Bahan Ajar Pancasila*. Yogyakarta: Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Ahmad Dahlan.
- Supomo, B. & Indriantoro, N. (2002). *Metode Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Gadjahmada.
- Wahyudi, B. (2018). Kepemimpinan Nasional dalam Perkembangan Lingkungan Strategis. *Pakuan Law Review*, 4(2), 312-331.